

**ANALISIS PERENCANAAN OBAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE
KONSUMSI DI INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN KOTA
KEDIRI TAHUN 2017**

**ANALYSIS OF DRUG PLANNING BY USING THE CONSUMPTION
METHOD AT PHARMACY INSTALLATION OF KEDIRI CITY HEALTH
OFFICE 2017**

Djembor Sugeng Walujo¹, Eko Yudha P², Septria F. A³

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 1 Maret
2018
Disetujui 1 Juni
2018
Dipublikasikan 16
Juni 2018

Kata Kunci:

Perencanaan Obat,
Metode Konsumsi.

Keywords :

*Drug Planning,
Consumption
Method.*

Abstrak

Latar belakang: Obat memegang peran yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pengelolaan obat kabupaten atau kota merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah kabupaten atau kota. **Tujuan:** Untuk mengetahui perencanaan kebutuhan obat menggunakan metode konsumsi di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri tahun 2017. **Metode:** Jenis penelitian deskriptif observasional dengan desain rancangan retrospektif menggunakan data Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) UPTD Puskesmas di seluruh Kota Kediri dan juga melakukan wawancara mendalam. **Hasil:** Berdasarkan analisis ABC terhadap rencana kebutuhan obat tahun 2017 terlihat bahwa dari 215 jenis obat yang perlu dilakukan pengadaan obat hanya 115 jenis obat, yang terdiri dari 25 jenis item obat termasuk kelompok A (21,74%) dengan biaya pengadaan sebesar Rp 605.826.367,- (70,21%). Sebanyak 23 item obat termasuk dalam kelompok B (20,00%) dengan biaya sebesar Rp 145.323.838,- (16,84%) dan kelompok C sebanyak 67 item (58,26%) dengan biaya sebesar Rp 111.708.155,- (12,95%). Hasilnya didapatkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan obat sebanyak Rp 863.830.208,-. **Simpulan:** Perencanaan kebutuhan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri belum sepenuhnya sesuai dengan perhitungan perencanaan yang tertera pada Kepmenkes RI Nomor: 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Tehnis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Abstract

Background: Drugs play an important role to improve healthcare. District or city drug management is the sole responsibility of the district or city government. **Objectives:** to know the planning needs of drugs using the method of consumption at Pharmacy Installation Kediri Health Office in 2017. **Methods:** This type of research is an observational descriptive study with retrospective design using data on Usage Report and Drug Requirement Sheet (LPLPO) UPTD Puskesmas throughout Kediri City and also conducted in-depth interviews to the Chief Medical Officer Kediri City Health Office. The calculation of drug needs plan is done by consumption method then presented in table form and described. **Results:** The results showed that based on ABC analysis on drug requirement plan in 2017, it was seen that from 215 kinds of drugs that need to be done only 115 drugs, consisting of 25 kinds of medicines including group A (21, 74%) with procurement cost of Rp 605,826,367, - (70.21%). A total of 23 items of drugs included in group B (20.00%) at a cost of Rp 145,323,838, - (16.84%) and group C included 67 items (58.26%) at a cost of Rp 111,708,155, - (12.95%). The result found that the budget required for the procurement of drugs as much as Rp 863.830.208,-. **Conclusions and suggestions:** The conclusion of this research is that the requirement planning of drug in Pharmacy Installation of Health Office of Kediri City is not fully in accordance with the planning calculation stipulated in Number: 1121 / Menkes / SK / XII / 2008 concerning Guideline for Public Procurement of drugs and health supplies.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang penting. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, baik menyangkut kesehatan pribadi maupun keluarganya termasuk di dalamnya mendapat makanan, pakaian, dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lain yang diperlukan.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (Kemenkes RI, 2010). Program pembangunan kesehatan nasional mencakup lima aspek Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) yaitu bidang Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengobatan. Pelayanan Kesehatan Dasar ini agar dapat dilaksanakan khususnya pada bidang pengobatan dibutuhkan obat-obatan yang memadai, oleh karena itu obat perlu dikelola dengan baik. Salah satu pengelolaan obat adalah dengan perencanaan agar persediaan sesuai dengan kebutuhan. Guna menjamin ketersediaan kebutuhan obat untuk pelayanan dasar tersebut, Pemerintah telah mengatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar sebagai acuan dalam melaksanakan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten atau Kota.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kota Kediri mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan khususnya di Kota Kediri. Segala bentuk pengawasan, pembinaan dan perijinan Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan, dan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan swasta ditangani oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Kediri membawahi 9 Puskesmas antara lain Puskesmas Kota Wilayah Selatan, Puskesmas Kota Wilayah Utara, Puskesmas Balowerti, Puskesmas Pesantren I, Puskesmas Pesantren II, Puskesmas Mrican, Puskesmas Sukorame, Puskesmas Campurejo dan Puskesmas Perawatan Ngletih (Dinkes Kota Kediri, 2015). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perencanaan obat dalam sistem manajemen kefarmasian yang merupakan suatu siklus yang harus dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang sehingga unsur-unsur manajemennya harus kuat untuk menunjang optimasi penggunaan dana melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perbekalan farmasi secara tepat, rasional, merata dan terlindung dari penyalahgunaan.

Akurasi perencanaan merupakan titik awal dari proses manajemen, sukses atau gagalnya suatu pengelolaan ditentukan oleh kegiatan dalam siklus yang paling lemah. Untuk mewujudkan pelaksanaan pada tahap perencanaan tersebut dilakukan pengadaan obat untuk memenuhi kebutuhan obat yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila lemah di dalam perencanaan, misalnya dalam penentuan suatu *item* barang yang seharusnya kebutuhan di dalam satu periode (misalnya 1 tahun) sebesar kurang lebih 1000 *unit*, tetapi

direncanakan sebesar 10.000 *unit*. Akibatnya akan mengacaukan suatu siklus manajemen logistik secara keseluruhan mulai dari pemborosan dalam penganggaran, membengkaknya biaya pengadaan dan penyimpanan, tidak tersalurkannya obat atau barang sehingga barang bisa rusak dan kedaluwarsa yang bagaimanapun baiknya pemeliharaan di gudang tidak akan membantu, karena itu perlu dilakukan penghapusan (terutama untuk obat) yang berarti kerugian. Apabila barang tidak rusak maka akan menumpuk di gudang yang merupakan *opportunity cost* (Seto, 2001).

Ada beberapa penelitian yang mengkaji masalah manajemen diantaranya yang dilakukan oleh Novianne Malinggas dengan judul Analisis Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah DR Sam Ratulangi Tondano yang menunjukkan belum efisiennya sistem pengelolaan obat-obatan diantaranya pada pengadaan dan pengendalian penggunaan obat yang masih terdapat kesalahan fraktur, fasilitas sarana dan prasarana penyimpanan obat yang belum memadai, pemusnahan dan penarikan obat yang rusak dan *expired date* yang tidak pernah dilakukan, serta administrasi baik pencatatan dan pelaporan kegiatan pengelolaan obat dilakukan belum sesuai dengan standar kefarmasian di rumah sakit. Selain itu, penelitian Sarlin Djuna tentang Sistem Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Labakkang Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen logistik di sarana pemerintah ini masih kurang pada pengadaan yang kadang mengalami kekurangan stok karena jumlah yang tidak sesuai dengan permintaan serta pada penyimpanan obat yang belum masuk ke dalam standar penyimpanan gudang obat. Oleh karena itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap tertibnya administrasi pengelolaan obat. Secara khusus penelitian-penelitian itu mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan manajemen yang terjadi di Rumah Sakit dan Puskesmas sedangkan penelitian di Dinas Kesehatan jarang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Obat dengan Menggunakan Metode Konsumsi di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan desain rancangan retrospektif dimana penelitian yang berusaha melihat ke belakang (*backward looking*), Penelitian dilakukan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri pada bulan Juli-Oktober 2017. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh data Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Sampel pada penelitian ini adalah data Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan obat seluruh UPTD Pukesmas Kota Kediri dari bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2016. Teknik Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik tidak secara acak yaitu *Purposive sampling* dimana sampel diambil sesuai kriteria sampel.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis ABC terhadap rencana kebutuhan obat tahun 2017 di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri tersebut terlihat bahwa dari 215 jenis obat yang perlu dilakukan pengadaan obat hanya 115 jenis obat, yang terdiri dari 25 jenis item obat termasuk kelompok A (21,74%) dengan biaya pengadaan sebesar Rp 605.826.367,- (70,21%).

Tabel 1. Rencana kebutuhan obat dengan analisis ABC di Dinas Kesehatan Kota Kediri tahun 2017.

Kelompok	Jml Item Obat	Biaya (Rp)	% Item	% Biaya
A	25	605.826.367	21,74 %	70,21 %
B	23	145.323.838	20,00 %	16,84 %
C	67	111.708.155	58,26 %	12,95 %
Jumlah	115	863.830.208	100,00%	100,00%

Obat dalam kelompok A perlu mendapat perhatian khusus dalam pengawasan dan pengendalian persediaannya karena nilai investasi yang besar dapat mengakibatkan biaya penyimpanan menjadi besar dan besarnya kerugian apabila terjadi kerusakan obat. Sebanyak 23 item obat termasuk dalam kelompok B (20,00%) dengan biaya sebesar Rp 145.323.838,- (16,84%). Sedangkan yang termasuk kelompok C sebanyak 67 item (58,26%) dengan biaya sebesar Rp 111.708.155,- (12,95%). Hasilnya didapatkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan obat sebanyak Rp 863.830.208,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).

PEMBAHASAN

Perencanaan kebutuhan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri dilakukan melalui koordinasi dengan tim perencanaan obat dan perbekalan kesehatan kota. Sumber data yang digunakan Dinas Kesehatan Kota Kediri berawal dari rekapan data pemakaian obat yang dicatat dalam laporan pemakaian obat bulanan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk menentukan jenis obat dari masing-masing UPT Puskesmas beserta usulan Puskesmas Pembantunya di Kota Kediri. Selanjutnya data di ajukan ke Dinas Kesehatan melalui bagian farmasi untuk dibuatkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Kota.

Pengadaan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri menggunakan pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* dengan *E-Purchasing*. menggunakan penentuan jumlah obat yang dibutuhkan dengan metode konsumsi dan *buffer stock*, yaitu pemakaian rata-rata tahun x 18 bulan. Menurut penelitian Rumbai *et al* (2015), penentuan jumlah kebutuhan yang dilakukan dalam merencanakan kebutuhan obat tersebut dinilai belum tepat. Kementerian Kesehatan dalam pedoman pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan menyebutkan bahwa untuk menentukan jumlah obat yang dibutuhkan berdasarkan metode konsumsi perlu memperhatikan beberapa data seperti daftar obat, stok awal, penerimaan, pengeluaran, sisa stok, obat hilang atau kadaluarsa, kekosongan obat, pemakaian rata-rata pertahun, waktu tunggu, stok pengaman dan perkembangan pola kunjungan. Hasilnya didapatkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan obat sebanyak Rp 863.830.208,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan antara lain perencanaan kebutuhan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri belum sepenuhnya sesuai dengan perhitungan perencanaan yang tertera pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Tehnis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan obat oleh Instalasi Farmasi di Dinas Kesehatan Kota Kediri yakni dalam kurangnya sumber daya manusia sehingga dapat mempengaruhi pengelolaan obat menjadi tidak tepat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan sebaiknya perencanaan kebutuhan obat disesuaikan dengan Keputusan Menteri kesehatan republik Indonesia Nomor: 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Tehnis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan Republik Indonesia. Perlu menambah tim perencanaan obat agar pengelolaan perencanaan kebutuhan obat di Instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri menjadi lebih tepat. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat dilakukan penelitian selanjutnya mengenai ketersediaan obat dan pendanaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri.

REFERENSI

- Aditama, Yoga, Tjandra. 2006. *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*. Edisi Kedua. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____. 2008. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- _____. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-Catalogue*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dinas Kesehatan Kota Kediri. 2015. *Profil Kesehatan Kota Kediri*. Kediri: Dinas Kesehatan Kota Kediri.
- Djuna, Sarlin, dkk. 2011. *Studi Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Labakkang Kabupaten Pangkep*. Artikel Penelitian.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novianne, dkk. 2015. *Analisis Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daersh DR Sam Ratulangi Tondano*. Artikel Penelitian JIKMU Volume 5 Nomor 2b April 2015.
- Rumbay N, Ingrid, dkk. 2015. *Analisis Perencanaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara*. Artikel Penelitian JIKMU Volume 5 Nomor 2b April 2015.
- Seto, S. 2004. *Manajemen Farmasi*. Surabaya: Airlangga University Press.